

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

11. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas					
1.1	Indikator 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	6%	N/A ^{a)}	N/A ^{**}	N/A ^{**}
1.2	Indikator 1.2 Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional	Persentase	100 %	50%	50%	100%
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing					
2.1	Indikator 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persentase	3,45% – 3,66%	3,45% - 3,66 %	4,26% ^{b)}	116,39%
2.2	Indikator 2.2 Indeks Efektivitas Stimulus Ekonomi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	N/A	N/A
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi					
3.1	Indikator 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	Jumlah	6 KSEP dari 6 KSEP	3 dari 6 KSEP	1 dari 6 KSEP	33%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	Capaian (%)
3.2	Indikator 3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	83%	41%	40%	98%
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata					
4.1	Indikator 4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	10,01%	8,5%	9% ^{c)}	105,88%
4.2	Indikator 4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Jumlah	USD 1.400 - 1.479	1.360	1.365,61 ^{c)}	100,41%
4.3	Persentase Penyelesaian Tata Kelola Program IQTF	Persentase	80 %	45%	45%	100%
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	4 dari 4	133,33%
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,53	117%
VII	Sasaran Program 7. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	Capaian (%)
7.1	Indikator 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase	92 %	46	46	100 %

a) Tidak terdapat target triwulanan

b) Menggunakan data: PDB Tw I 2026 dan Sakernas Februari 2026

c) Angka proyeksi internal

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas
----------	--

Pencapaian Sasaran Program 1: **Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja: Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan dan Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1. Peningkatan
Nilai Tambah
Bruto Industri
Pengolahan**

Latar Belakang

Prioritas Nasional 5 (PN 5) dalam RPJMN 2026-2029 menargetkan terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan melalui pembangunan fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi, dan berdaya saing global. Keberhasilan sasaran ini diukur salah satunya melalui peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan. Untuk mendukung peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sektor industri pengolahan non-migas, dengan Kementerian Perindustrian sebagai *stakeholder* atau mitra kerja utama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara industri pengolahan migas berada di bawah koordinasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada tahun 2024, industri pengolahan mencatatkan kontribusi signifikan sebesar 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Industri Pengolahan non migas mencakup 16 sektor dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu:

1. Industri Makanan dan Minuman
2. Industri Pengolahan Tembakau
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
9. Industri Barang Galian bukan Logam
10. Industri Logam Dasar
11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik
12. Industri Mesin dan Perlengkapan
13. Industri Alat Angkutan
14. Industri Furnitur
15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

RPJMN tahun 2026-2029 menetapkan target peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai berikut: (i) Tahun 2026: 5,50%, yoy dan (ii) Tahun 2029: 8,14%,yoy. Untuk menetapkan target pertumbuhan tahunan pada periode antara tahun 2026 dan 2029, yaitu tahun 2026, 2027, dan 2028, dilakukan forecasting (peramalan) menggunakan deret waktu (time series) data lima tahun terakhir (2021 s.d. 2024). Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh target pertumbuhan industri pengolahan terhadap PDB untuk tahun-tahun

tersebut sebagai berikut: (i) Tahun 2026: 5,70%,yoy; (ii) Tahun 2027: 6,85%,yoy; dan (iii) Tahun 2028: 7,81%,yoy.

Dikarenakan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Pemerintah menargetkan sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,85%,yoy s.d 6,38%,yoy untuk tahun 2026, sehingga terdapat urgensi pemutakhiran target Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra D5 yaitu dari yang semula diproyeksikan sekitar 5,7%,yoy, meningkat menjadi 6%,yoy, dengan tetap konsisten menggunakan metodologi perhitungan yang sama. Penyesuaian target ini merupakan langkah strategis untuk (i) memperkuat posisi industri pengolahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) Mempercepat transformasi struktur ekonomi melalui peningkatan produktivitas; dan (iii) meningkatkan daya saing industri domestik di tengah ketidakpastian global. Dengan pemutakhiran target yang lebih progresif, diharapkan transformasi struktur ekonomi dapat terakselerasi secara konsisten.

Target persentase realisasi indikator kinerja Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan tahun 2026 adalah sebesar 6%, diukur dengan formula berikut:

$$\text{Peningkatan NTB Industri Pengolahan (\%)} = \sum \frac{(\text{NTB Industri Pengolahan } t - \text{NTB Industri Pengolahan } t-1)}{\text{NTB Industri Pengolahan } t-1} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Penetapan target kinerja tahun 2026 sebesar 6% didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen RPJMN 2026-2029. Adapun target kinerja ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulan.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	6 %	N/A*	N/A**	N/A**

*) Tidak terdapat target triwulanan

**) Data BPS belum tersedia

Persentase realisasi Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDB Triwulan II tahun 2026 merupakan target tahunan sehingga target belum dapat tercapai. Sampai dengan dibuatnya laporan ini, BPS belum merilis *update* PDB Triwulan II tahun 2026 sehingga realisasi pada Triwulan I tahun 2026 belum dapat diperoleh.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan Koordinasi berupa kegiatan rapat atau FGD lintas pemangku kepentingan guna mengidentifikasi, membahas, dan menyelesaikan isu strategis serta permasalahan industri pengolahan nonmigas;		1. Monitoring dan Diskusi terkait Industri Kayu PT Sumber Graha Sejahtera (Sampoerna Kayoe) di Kawasan Industri Terpadu Batang tanggal 5 Juni 2026 2. Rapat Pembahasan Potensi Investasi Pengembangan Komoditas Malapari di Kabupaten Lembata tanggal 19 Mei 2026 3. Monitoring dan Diskusi terkait Pengembangan Industri Makanan dan Minuman di PT Great Giant Pineapple dan PT Sari Segar Husada tanggal 25 Mei 2026
2.	Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan Industri pengolahan khususnya nonmigas.		1. Penyampaian Analisis Kondisi Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Peningkatan Biaya Konstruksi pada 18 Mei 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Ikut serta hadir dalam Rapat Pembahasan Dukungan Pemerintah untuk Mobil Nasional pada 1 April 2026
2. Ikut serta hadir dalam Rapat Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis pada 7 April 2026;
3. Ikut serta hadir dalam FGD Penajaman Penyusunan Naskah Kajian Kebijakan Penguatan Industrialisasi Kendaraan Listrik melalui Insentif TKDN dan Pengelolaan Limbah Baterai 16 April 2026;
4. Ikut serta hadir dalam Rapat Koordinasi Rencana Penguatan Industri Baja Nasional pada 25 Mei 2026;
5. Ikut serta hadir dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) pada 11 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada anggaran konsumsi rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi capaian belum dapat ditampilkan karena jadwal rilis data pertumbuhan PDB sektoral oleh BPS belum tersedia pada periode pelaporan ini. Namun, berdasarkan identifikasi ke deputian, terdapat beberapa kendala substantif yang berpotensi mempengaruhi pencapaian target akhir 6% yoy, yaitu

1. Kondisi ketidakstabilan geopolitik dan perang dagang global yang berdampak signifikan terhadap rantai pasok industri dalam negeri dan pangsa pasar ekspor nasional.
2. Keterbatasan ketersediaan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme koordinasi internal di lingkungan unit terkait;
3. Hambatan koordinasi akibat adanya transisi rencana perubahan struktur organisasi internal dan irisan substansi antar deputi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dalam beberapa Rapat Koordinasi, kementerian teknis dan seluruh *stakeholder* terkait telah berupaya mendorong transformasi industri yang adaptif, inovatif, inklusif dan berkelanjutan.
2. Dalam rangka mitigasi dinamika perekonomian global akibat ketidakstabilan politik, perang dagang global, dan perubahan iklim global seluruh K/L dan *stakeholder* terkait berupaya menjaga stabilitas pemenuhan bahan baku, penguatan tata niaga impor dan peningkatan pangsa pasar ekspor.
3. Dalam rangka mengatasi hambatan akibat efisiensi anggaran, kami mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia seperti melaksanakan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan ruang rapat kantor dan/atau menggunakan fasilitas *Zoom online meeting* agar rencana aksi dapat tetap tercapai secara optimal. Selain itu, dilakukan penetapan revisi alokasi anggaran yang lebih dikontrol agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga rencana aksi dapat dicapai secara keseluruhan.
4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian sebagai prasyarat dalam setiap permintaan data berkala yang diterbitkan oleh unit dimaksud.

1.2. Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional

Latar Belakang

Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan ANEKA (ILMATEA) merupakan salah satu sektor industri yang memiliki kontribusi signifikan terhadap industri pengolahan non migas. Pada Triwulan III-2026, kontribusi Industri LMATEA tercatat sebesar 4,51% terhadap PDB Nasional. Pada Tahun 2024, laju pertumbuhan Industri ILMATE rata-rata sebesar 4,10%, dimana laju pertumbuhan PDB Nasional hanya berkisar 5,03%, dan laju pertumbuhan industri pengolahan non migas sebesar 4,75%.

Kebijakan utama pada Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka difokuskan pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pada sektor industri pengolahan non migas khususnya logam, mesin, elektronika, dan aneka. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa tanggung jawab penuh terhadap naik atau turunnya industri pengolahan non migas berada di bawah wewenang Kementerian Perindustrian yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian.

Dalam rangka memperkuat daya saing industri nasional dan menjawab tantangan global pada era transformasi digital, diperlukan upaya untuk mendorong terbentuknya sumber pertumbuhan ekonomi baru guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada Tahun 2029. Dalam konteks tersebut, industri semikonduktor merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Industri semikonduktor tercatat memberikan kontribusi sekitar 19% terhadap total perdagangan barang elektronik global. Pemerintah mendorong pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru sebagai bagian integral dari penguatan sektor industri LMATEA. Semikonduktor merupakan teknologi kunci (*enabling technology*) yang menopang berbagai industri strategis, seperti elektronika, otomotif, alat kesehatan, pertahanan, energi terbarukan, serta teknologi digital dan kecerdasan artifisial. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem semikonduktor tidak hanya berorientasi pada aspek industri hulu–hilir, tetapi juga mencakup penguatan riset dan inovasi, pengembangan SDM, pembiayaan, regulasi, serta kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait.

Sasaran Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri pengolahan khususnya ILMATEA yang berkualitas dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis komoditi, meningkatkan ekspor serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional dilihat dari proses penyusunan Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru. Peta Jalan tersebut berfungsi sebagai instrumen koordinasi lintas sektor dan lintas K/L dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan ekosistem semikonduktor secara terintegrasi, bertahap, dan berkelanjutan. IKU ini merupakan persentase dari pemenuhan bukti dukung pelaksanaan rapat koordinasi penyelesaian penyusunan peraturan presiden terkait peta jalan tersebut yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Adapun komponen penilaian berdasarkan progress pembahasan penyusunan peraturan presiden dari awal koordinasi penyusunan regulasi hingga penetapan peraturan presiden dan implementasi rencana aksi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 100% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata 2026-2029. Adapun target Triwulan II sebesar 50%.

Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional dihitung berdasarkan pencapaian pengembangan pada RPerpres Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor selama tahun 2026. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional :

1. Dukungan awal penyusunan regulasi = 25%
2. Rapat koordinasi penyelesaian hambatan dan tantangan dalam pengembangan industri semikonduktor = 50%
3. Rapat koordinasi antar Kementerian pembahasan RPerpes = 75%
4. Perumusan Rancangan Peraturan Presiden = 100%

Masing-masing komponen tersebut dijabarkan dalam rencana aksi berikut:

1. Dukungan awal penyusunan regulasi

- Pelaksanaan rapat-rapat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor.
- Pengumpulan dan konsolidasi masukan substansi dari kementerian/lembaga terkait.
- Penyusunan draf awal R-Perpres.

2. Rapat koordinasi penyelesaian hambatan dan tantangan dalam pengembangan industri semikonduktor

- Pemetaan potensi dan tantangan kondisi industri domestik dalam pengembangan industri semikonduktor.
- Perumusan alternatif penyelesaian untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam pengembangan industri semikonduktor.
- Perumusan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam pengembangan industri semikonduktor.

3. Rapat koordinasi antar Kementerian pembahasan RPerpes

- Finalisasi draf R-Perpres
- Penyempurnaan draf R-Perpres berdasarkan hasil pembahasan PAK

4. Perumusan Rancangan Peraturan Presiden

- Penyusunan laporan perumusan R-Perpres.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional yang telah terealisasi sebesar 50% atau mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2026 sebesar 50% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.2 Persentase Pengembangan Industri	Persentase	100 %	50%	50%	100%

Semikonduktor Nasional					
------------------------	--	--	--	--	--

Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional pada Triwulan II didapatkan dari tersusunnya RPerpres Pengembangan Semikonduktor dan Teknologi Baru hasil dari rangkaian pembahasan dan konsolidasi masukan dari stakeholder terkait.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Penyusunan draf RPerpres.	Terlaksana	Penguatan SDM Industri Semikonduktor: Diusulkan penyempurnaan target pengembangan talenta sesuai kebutuhan industri, termasuk penambahan program pendidikan pascasarjana berbasis riset (<i>degree by research</i>). Penguatan Kolaborasi Ekosistem Industri: Diusulkan pembentukan pusat kolaborasi riset semikonduktor, penguatan program pengembangan startup melalui skema akselerator, perluasan keterlibatan pemangku kepentingan, serta penyempurnaan target <i>partnership</i> dan <i>co-development</i> produk.
2	Pembahasan substansi RPerpres dalam forum rapat PAK	Terlaksana	Penguatan Kebijakan dan Dukungan Ekosistem: Diusulkan penyempurnaan skema insentif, penguatan pendanaan, penyelarasan roadmap dengan pengembangan kawasan industri/KEK, pelibatan Bappenas, serta penyesuaian target

			investasi sektor semikonduktor. Penguatan Infrastruktur Industri: Diusulkan penyelarasan target pengembangan IP dan <i>co-produce chip</i> , penguatan fasilitas R&D, modernisasi <i>advanced packaging</i> , serta penguatan aspek standarisasi produk semikonduktor.
3	Pelaksanaan rapat koordinasi untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam pengembangan industri semikonduktor	Terlaksana	Kunjungan Lapangan - Eksposur Kemampuan Testing dan Packaging (ATP) Produk Semikonduktor di PT UTAC Indonesia, Karawang pada 2 Juni 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Ikut serta hadir dalam Rapat Trilateral Meeting I Pasca SBPI TA 2027 pada 19 Mei 2026
- Penguatan dan Pengembangan SDM Industri Semikonduktor:** Disepakati perlunya penyempurnaan target pengembangan talenta agar selaras dengan proyeksi kebutuhan industri dan target nasional 15.000 SDM, mencakup kebutuhan untuk sektor chip design, ATP, dan wafer fabrication. Selain itu, diusulkan penambahan program pendidikan pascasarjana berbasis riset (*degree by research*) di bidang semikonduktor.
- Penguatan Kolaborasi Rantai Pasok Industri:** Diusulkan pembentukan Pusat Kolaborasi Riset, Teknologi, dan Inovasi Semikonduktor dengan memanfaatkan ICDEC sebagai embrio serta melibatkan industri, perguruan tinggi, BRIN, dan Kementerian Perindustrian. Selain itu, diusulkan penambahan skema akselerator pada program pengembangan startup, perluasan keterlibatan pemangku kepentingan (termasuk Kementerian Kesehatan) dalam program *co-development* dan *business matching*, serta penyempurnaan target kemitraan dan *co-development* produk.

Seluruh komponen rencana aksi pada indikator Persentase Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah **terlaksana**. Untuk itu, capaian realisasi indikator ini telah tercapai 50% sesuai dengan target yaitu 50% untuk Triwulan II-2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

- Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada anggaran konsumsi

rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;

2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Upaya perbaikan “melaksanakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait perihal pembagian peran dalam pengembangan ekosistem semikonduktor” berdasarkan triwulan I belum dapat terlaksana. Pengerjaan isu semikonduktor diarahkan kepada unit kedeputian lain.
2. **Penyempurnaan target dan program roadmap:** Target dan program dalam draft roadmap perlu disempurnakan agar lebih selaras dengan kebutuhan industri semikonduktor nasional, khususnya terkait pengembangan SDM, startup, investasi, IP, dan *co-produce chip*.
3. **Penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan:** Diperlukan penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga, perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri, termasuk kejelasan pembagian peran, mekanisme kolaborasi, serta sinkronisasi dengan kebijakan dan program yang telah berjalan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait perihal progress dalam pengembangan ekosistem semikonduktor dan regulasinya.
2. **Penyempurnaan draft roadmap:** Melakukan penyempurnaan draft roadmap dengan mengakomodasi masukan para pemangku kepentingan, termasuk penyesuaian target, program strategis, indikator, dan stakeholder pelaksana pada setiap pilar.
3. **Penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga:** Melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Danantara, dan kementerian/lembaga terkait sebagai persiapan FGD lanjutan untuk memperoleh kesepakatan terhadap roadmap pengembangan ekosistem industri semikonduktor nasional.

Pencapaian Sasaran Program 2: **Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

Latar Belakang

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing nasional. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2026 yang diolah oleh Pusdatik Kemnaker, tingkat produktivitas tenaga kerja pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp 92,67 juta per tenaga kerja per tahun. Meskipun menunjukkan tren peningkatan konsisten, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih 10% di bawah rata-rata ASEAN sehingga menjadi tantangan utama dalam mendorong GDP, GNI per kapita, dan capaian Indonesia emas 2045.

Tantangan peningkatan produktivitas ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks kualitas dasar, Indonesia terus berupaya memulihkan capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* (PISA) siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022 agar dapat mendekati rata-rata negara OECD yang berada di angka 488,33. Rendahnya literasi ini menjadi hambatan struktural dalam adopsi teknologi di tempat kerja.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan angkatan kerja Indonesia. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2026, dari total 154 juta angkatan kerja, struktur pendidikan tenaga kerja masih didominasi oleh kelompok dengan pendidikan rendah. Proporsi angkatan kerja lulusan pendidikan rendah (SMP/MTs ke bawah) sebesar 51,86%, sementara lulusan pendidikan menengah (SMA/SMK) sebesar 35,08%, dan lulusan pendidikan tinggi (Diploma/Universitas) baru mencapai sebesar 13,06%.

Kualifikasi pendidikan yang belum optimal ini berdampak langsung pada daya serap tenaga kerja, di mana persentase pekerja yang mampu mengisi jabatan di sektor formal sebesar 42,20%. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan mendorong terciptanya ekosistem yang kondusif untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar **3,45% - 3,66%** penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan dokumen RPJMN 2026-2029. Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja sebesar 4,26%* atau mencapai 116,39 % dari target triwulan II 2026.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi	% Kinerja
----------------------------	--------	-------------------------	--------------------------	-----------	--------------

IKU 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persenta se	3,45%- 3,66%	3,45% - 3,66%	4,26%*	116,39%
---	----------------	-----------------	------------------	--------	---------

*) menggunakan data PDB Tw I 2026 dan Sakernas Februari 2026

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan koordinasi melalui rapat atau FGD penyelesaian isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Terlaksana	• <i>High-Level Roundtable Discussion Link and Match</i> Pelatihan dan Penempatan Kerja Kawasan yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan tanggal 23 April 2026. • Koordinasi tindak lanjut Perpres 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online • Koordinasi dan monitoring perkembangan pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh • Koordinasi Program Link and Match Pelatihan Vokasi dan Penempatan Tenaga Kerja di KEK dan PSN • Monitoring implementasi Bantuan Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 untuk Pengemudi dan Kurir Angkutan Berbasis Aplikasi

			• Koordinasi Lintas K/L Terkait Tindak Lanjut Program SMK Go Global • Koordinasi Pembahasan terkait <i>Force Labor</i> dan Pekerja Anak
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terlibat dalam *Tripartite Technical Meeting* untuk menyusun *Decent Work Country Program 2026-2030* pada 4-6 Mei 2026.
2. Audiensi dengan platform transportasi online terkait arah kebijakan komisi pengemudi dan regulasi ketenagakerjaan sektor transportasi online

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya, di antaranya:

1. Melakukan upaya efisiensi anggaran dengan melakukan lebih banyak proses koordinasi, sinkronisasi dan pemberian layanan melalui aplikasi teleconference seperti Zoom.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan THR oleh Ombudsman, masih ditemukan sejumlah perusahaan mencicil pembayaran THR, serta infrastruktur posko pelayanan masih terbatas.
2. Masih terdapat kesenjangan antara lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan spesifikasi dan standar kompetensi yang dibutuhkan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Pemerintah meningkatkan tambahan target pelatihan vokasi nasional kepada 220.000 lulusan SMA/SMK dan 50.000 terdampak PHK. Hal ini dilakukan melalui identifikasi melalui penyelarasan program pelatihan dengan kebutuhan industri serta penguatan implementasi pelatihan berbasis *demand-driven* bekerja sama dengan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) melalui skema *Tailor Made Training* (TMT).

2.2 Indeks Efektivitas Stimulus Ekonomi Program Pemagangan Lulusan

Latar Belakang

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing nasional. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024 yang diolah oleh Pusdatin Kemnaker, tingkat produktivitas tenaga kerja pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 89,33 juta per tenaga kerja per tahun. Meskipun menunjukkan tren peningkatan konsisten,

Perguruan Tinggi

tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih 10% di bawah rata-rata ASEAN sehingga menjadi tantangan utama dalam mendorong GDP, GNI per kapita, dan capaian Indonesia emas 2045.

Tantangan peningkatan produktivitas ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks kualitas dasar, Indonesia terus berupaya memulihkan capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* (PISA) siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022 agar dapat mendekati rata-rata negara OECD yang berada di angka 488,33. Rendahnya literasi ini menjadi hambatan struktural dalam adopsi teknologi di tempat kerja.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan angkatan kerja Indonesia. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2026, dari total 154 juta angkatan kerja, struktur pendidikan tenaga kerja masih didominasi oleh kelompok dengan pendidikan rendah. Proporsi angkatan kerja lulusan pendidikan rendah (SMP/MTs ke bawah) sebesar 51,86%, sementara lulusan pendidikan menengah (SMA/SMK) sebesar 35,08%, dan lulusan pendidikan tinggi (Diploma/Universitas) baru mencapai sebesar 13,06%.

Kualifikasi pendidikan yang belum optimal ini berdampak langsung pada daya serap tenaga kerja, di mana persentase pekerja yang mampu mengisi jabatan di sektor formal sebesar 42,20%. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan mendorong terciptanya ekosistem yang kondusif untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Namun, hingga Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat realisasi capaian karena program magang belum memasuki tahap pelaksanaan. Oleh karena itu, indikator yang terkait dengan program tersebut belum dapat direalisasikan dan realisasinya akan dilaporkan setelah program mulai dilaksanakan pada periode berikutnya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1 Indeks Efektivitas Stimulus Ekonomi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	N/A*	N/A*

*) Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi belum terlaksana

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Laju Indeks Efektivitas Stimulus Ekonomi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2025	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi tanggal 18 Mei 2026 bersama Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian PPN/Bappenas. - Telah dilaksanakan Talk Show Pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi bagi Peserta Magang di Lingkup Kemenko Perekonomian tanggal 13 Mei 2026
2	Penyiapan Pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026	Terlaksana	- Telah dilakukan koordinasi dengan mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera mengusulkan anggaran ABT ke Kementerian Keuangan untuk keberlanjutan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026 yang ditargetkan 150 ribu peserta. - Pelaksanaan Rapat Harmonisasi RPermenaker Perubahan Kedua Permenaker 8/2025 tanggal 4 Juni 2026.

Pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Batch 1-3 telah selesai dilaksanakan, terdapat 102.696 orang yang ditetapkan menjadi peserta

magang (62.260 magang di industri dan 40.436 magang di K/L). Peserta magang ini tersebar di 5.168 perusahaan dan 2.886 Satker K/L. Berdasarkan latar belakang pendidikan peserta magang, didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 84.945 orang dan sisanya lulusan D1-D4. Berdasarkan jenis kelamin, di dominasi oleh perempuan 63,96% dan laki laki 36,04%.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya, di antaranya:

1. Melakukan upaya efisiensi anggaran dengan melakukan lebih banyak proses koordinasi, sinkronisasi dan pemberian layanan melalui aplikasi teleconference seperti Zoom.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pelaksanaan Program Pemagangan Tahun 2026 belum dapat terlaksana. Pelaksanaan program magang disesuaikan menjadi tanggal 10 Agustus 2026 dikarenakan masih berlangsungnya penerbitan persetujuan pelaksanaan Program Pemagangan Tahap II oleh Kementerian Sekretariat Negara.
2. Terdapat penurunan peserta magang aktif dari jumlah yang ditetapkan di awal (102.696 orang) dengan berbagai alasan, seperti kendala lokasi, sudah diterima kerja, maupun mengundurkan diri dengan alasan lainnya.
3. Tingginya proporsi penempatan magang di Kementerian /Lembaga (mencapai 40%) menjadi kendala dalam optimalisasi penyerapan peserta magang menjadi pegawai/karyawan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah Sosialisasi program magang perguruan tinggi ke sejumlah perusahaan di beberapa wilayah.

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Program 3: **Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja :

1. Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing;
2. Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

dapat diuraikan sebagai berikut:

Adapun rincian Realisasi IKU 3.2 yaitu Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga TW II 2026 yaitu sebagai berikut:

3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)

Latar Belakang

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025–2029, pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang diterjemahkan ke dalam empat pilar pembangunan dan tujuh agenda pembangunan nasional. Ketujuh agenda tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yang mencakup aspek pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, hingga penguatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Indikator Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang Siap Beroperasi mencerminkan capaian implementasi pembangunan infrastruktur nasional yang strategis sesuai target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMN. Setiap proyek PSN harus tercantum dalam daftar proyek prioritas nasional dan pelaksanaannya dipantau oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bersama kementerian/lembaga teknis terkait. Proyek-proyek ini berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing wilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Kriteria Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Dinyatakan Telah Selesai adalah sebagai Berikut:

1. Sektor Kawasan (contohnya Kawasan Industri): Proyek dinyatakan selesai apabila telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang berlaku secara efektif.
2. Sektor Transportasi, Energi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Sanitasi: Proyek dianggap selesai ketika telah memasuki tahap operasional atau mulai beroperasi secara fungsional.
3. Sektor Bendungan: Proyek dikategorikan selesai saat dimulainya proses pengisian awal bendungan (*impounding*), setelah seluruh konstruksi bendungan dinyatakan tuntas.

Pencapaian terbangunnya PSN melibatkan koordinasi antara Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, serta masyarakat, dengan pendekatan kolaboratif untuk memastikan kelancaran implementasi dan pencapaian output proyek sesuai jadwal. Berdasarkan Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta pembaruan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 dan Permenko Nomor 19 Tahun 2025, daftar PSN terbaru mencakup 226 proyek dan 26 program yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Tercapainya target atas Indikator “Penyelesaian Proyek Strategis Nasional” didukung oleh dokumen berikut:

1. Dokumen Implementasi Kebijakan terkait Skema Pendanaan Infrastruktur (Perpres No.66/2024 tentang HPT, Perpres 79/2024 tentang LVC, SDG Indonesia One Fund, Strategi Pendanaan BUMN);
2. Nota Dinas Penyampaian Progres Penyelesaian Proyek Strategis Nasional;
3. Paparan terkait Progres Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (dalam bentuk PPT);
4. Laporan Semester KPPIP terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
5. Laporan evaluasi daftar Proyek Strategis Nasional (Laporan Tahunan);
6. Laporan Kepada Presiden terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Penyusunan Project Completion Report (PCR);
8. Kajian Dampak PSN terhadap nasional dan regional.

Target Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun Anggaran 2026 adalah penyelesaian 9 dari 10 proyek dengan persentase 83% dengan daftar proyek sebagai berikut:

- KI Tanah Kuning (PT ISI)
- KI Kuala Tanjung
- Tol Sigli - Banda Aceh
- Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase I (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)
- Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)
- Tangki LPG Kupang (1 sub proyek dari 4 proyek PSN Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG--sub lainnya sudah selesai)
- Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang Tahap II (bagian dari PSN Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang - Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei – Dumai)
- RDMP Balikpapan (bagian dari PSN 207 Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/Refinery Development Master Plan (RDMP))
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang
- SPAM Regional Benteng – Kobema

Penetapan target Tahun 2026 didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek hingga Desember 2025. Dalam pelaksanaan Tahun 2026, proyek tersebut memerlukan kepastian terhadap beberapa aspek, antara lain: 1)

Alokasi anggaran APBN/APBD; 2) Ketersediaan anggaran investasi Badan Usaha; dan 3) Penyelesaian berbagai isu, seperti pengadaan lahan, KKPR, dan perizinan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka penetapan target sebesar 9 dari 10 ditetapkan secara realistis dan terukur.

Formula pengukuran target penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun 2026 dihitung dengan membandingkan jumlah proyek yang berhasil diselesaikan dengan jumlah total proyek yang ditargetkan selesai pada tahun tersebut. Hasil dari perhitungan ini menunjukkan persentase capaian realisasi proyek terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan triwulanan atau tahunan.

Cara Pengukuran target penyelesaian PSN di Tahun 2026:

1. Identifikasi PSN yang masuk ke dalam Major Project RPJMN;
2. Menentukan target jumlah PSN di tahun 2026 sebanyak 10 proyek,

$$\text{Persentase Penyelesaian PSN} = \frac{\sum \text{proyek selesai}}{\sum \text{target proyek selesai}} \times 100\%$$

Adapun rincian Realisasi IKU 3.2 yaitu Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga TW II 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	41%	40%	98%

Hingga triwulan II tahun 2026, persentase penyelesaian PSN telah terealisasi sebesar 40% yang didapatkan dari persentase jumlah PSN yang telah selesai dibandingkan dengan jumlah PSN yang ditargetkan selesai pada triwulan II tahun 2026. Persentase penyelesaian PSN pada triwulan II didapatkan dari penyelesaian pembangunan 4 dari 10 proyek pada triwulan II tahun 2026. Adapun 4 PSN yang telah didorong penyelesaiannya oleh Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata hingga triwulan II tahun 2026 antara lain:

No.	Nama Proyek	Sektor
1.	Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase I (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)	Energi
2.	Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)	Energi
3.	RDMP Balikpapan (bagian dari PSN 207 <i>Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/Refinery Development Master Plan</i> (RDMP))	Energi

	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Air Bersih dan Sanitasi
--	--	-------------------------

Untuk tahun 2026, ditargetkan 10 PSN selesai. Untuk memenuhi target tersebut, saat ini Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata mendorong 10 PSN agar dapat selesai di tahun 2026. Berikut merupakan daftar proyek yang ditargetkan selesai pada tahun 2026 sebagai berikut:

Daftar Proyek Strategis Nasional	Sektor
KI Tanah Kuning (PT ISI)	Air Bersih Dan Sanitasi
KI Kuala Tanjung	Kawasan
Tol Sigli - Banda Aceh	Jalan dan Jembatan
Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase I (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)	Energi
Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (bagian dari Program PSN Program Pembangunan Smelter)	Energi
Tangki LPG Kupang (1 sub proyek dari 4 proyek PSN Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG--sub lainnya sudah selesai)	Energi
Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang Tahap II (bagian dari PSN Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang – Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei – Dumai)	Energi
RDMP Balikpapan (bagian dari PSN 207 Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/ <i>Refinery Development Master Plan</i> (RDMP))	Energi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Air Bersih dan Sanitasi
SPAM Regional Benteng – Kobema	Air Bersih dan Sanitasi

Sampai dengan Triwulan II, telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka pencapaian target Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain:

- Koordinasi dan Monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.
- Koordinasi terkait alokasi anggaran dan penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN bersama LMAN.
- Koordinasi evaluasi PSN eksisting dan usulan PSN Baru.

- Penyelesaian hambatan kendala dan debottlenecking dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek PSN yang ditargetkan
- Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian teknis terkait perizinan dalam Pembangunan PSN.
- Sosialisasi capaian PSN melalui Media Nasional kepada masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Rapat koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penambahan Alokasi Pendanaan Pengadaan Tanah dari Investasi Pemerintah TA 2026 pada tanggal 15 April 2026 2. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penambahan Alokasi Pendanaan Pengadaan Tanah dari Investasi Pemerintah TA 2026 pada tanggal 15 April 2026 3. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Isu Pertanahan PSN Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada tanggal 4 Mei 2026 4. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Realokasi Anggaran Pengadaan Tanah Melalui LMAN pada tanggal 18 Mei 2026 5. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Perkeretaapian melalui LMAN Tahun 2026 pada tanggal 11 Juni 2026

2.	Rapat koordinasi dan monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tanggal 2 April 2026 2. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Sigli – Banda Aceh di Provinsi Aceh pada tanggal 23 April 2026 3. Telah dilaksanakan Monitoring Pembangunan Proyek Strategis Nasional PLTA Mentarang Induk dan PLTS Terapung Tembesi Triwulan I pada tanggal 23 April 2026 4. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Jakarta Sewerage System (JSS) pada tanggal 23 April 2026 5. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PSN Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang di wilayah BBWS Cimanuk Cisanggarung pada tanggal 28 April 2026 6. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi Subsektor Hulu Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 6 Mei 2026 7. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek PSN Sektor Energi pada 4 Juni 2026 8. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi Program Pembangunan Smelter pada tanggal 10 Juni 2026 9. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit PT Tianshan Alumina Indonesia pada tanggal 18 Juni 2026
----	--	------------	---

3.	Rapat Koordinasi dan sinkronisasi terkait penetapan list pilot project dengan menggunakan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Diskusi dengan World Bank terkait LVC pada tanggal 6 Mei 2026 2. Telah dilaksanakan Rapat dengan ADB terkait LVC pada tanggal 13 Mei 2026
4.	Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 Juni 2026
5.	Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat	Terlaksana	Telah dilaksanakan publikasi melalui Instagram KPPIP @kppip

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, Upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Penyiapan Data Dukung Pendanaan Pengadaan Tanah Program Strategis Nasional Kawasan Sentra Industri Garam Nasional pada tanggal 22 Januari 2026
2. Telah dilaksanakan Rapat Prioritisasi Dana Pengadaan Tanah LMAN Tahun Anggaran 2027 pada tanggal 28 Januari 2026
3. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Target Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2026 pada tanggal 26 Januari 2026
4. Telah dilaksanakan Lokakarya 3.1 “Peluang Bisnis dan Tahapan Implementasi TOD Tawang dan Weleri” pada tanggal 12 Maret 2026
5. Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pedoman Pelaksanaan Skema Pendanaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada tanggal 4 Maret 2026
6. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang Port di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Januari 2026
7. Telah disampaikan Laporan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Semester II Tahun 2025 kepada Bapak Presiden RI pada tanggal 27 Februari 2026
8. Telah dilaksanakan publikasi melalui Instagram KPPIP @kppip
9. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi PSN yang Dikelola PT Pelabuhan Indonesia pada tanggal 14 Januari 2026
10. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tanggal 10 Maret 2026
11. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi PSN yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Maret 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh

implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi teleconference dalam melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan PSN. Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Untuk progres penyusunan perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dituangkan dalam permenko, saat ini masih dalam pembahasan bersama K/L terkait. Selain itu, Asdep PKEPS saat ini masih melakukan proses evaluasi terhadap usulan baru maupun proyek-proyek eksisting, termasuk penilaian terhadap proyek yang diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar PSN.
- Adanya hambatan teknis dalam pelaksanaan dan isu pengadaan tanah yang masih berproses (tanah musnah, konsinyasi, tanah wakaf, tanah kas desa, tanah di kawasan hutan dan tanah instansi) baik dari segi regulasi dan pelaksanaan di lapangan.
- Kendala juga terjadi akibat adanya kesulitan dalam sinkronisasi kebijakan antara pemanku kepentingan dalam mendukung percepatan pemenuhan persyaratan pembangunan Proyek Strategis Nasional.
- Adanya hambatan terkait kebutuhan penambahan anggaran/ pendanaan proyek.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga (KL) terkait dimana rapat koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan substansi, menjaring masukan teknis, dan memastikan dukungan serta kesepahaman lintas instansi terhadap arah revisi kebijakan.
- Melakukan koordinasi lanjutan jika terjadi *debottlenecking* dalam pembahasan. Apabila terdapat hambatan atau perbedaan pandangan dalam proses pembahasan, maka akan dilakukan koordinasi kembali dengan KL terkait guna mencari solusi dan memastikan proses tetap berjalan sesuai target.
- Perlunya rapat koordinasi dengan stakeholder terkait isu pengadaan tanah dan proses perizinan.
- Perlunya alternatif pembiayaan dalam rangka percepatan penyelesaian PSN.
- Adanya monitoring dan evaluasi atas penyelesaian isu dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.
- Penggunaan sumber daya yang maksimal untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan kinerja.

4

Sasaran Program 4: Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata

Pencapaian Sasaran Program 2: **Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja :

1. Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman
2. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)

3. Persentase Penyelesaian Tata Kelola Program IQTF

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman

Latar Belakang

Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, peningkatan kapasitas produksi pada sektor-sektor produktif, termasuk sektor pariwisata, perlu dilaksanakan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Pengembangan sektor pariwisata diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan jumlah perjalanan dan kunjungan wisatawan, tetapi juga untuk memperkuat aktivitas ekonomi pada berbagai lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata.

Salah satu lapangan usaha yang mencerminkan perkembangan aktivitas pariwisata adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Lapangan usaha ini diperkirakan terus berkembang dan berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kinerjanya dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas dan aktivitas wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, serta pelaksanaan berbagai kegiatan, pertemuan, dan event di destinasi pariwisata.

Dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencakup kegiatan penyediaan akomodasi atau penginapan jangka pendek bagi pengunjung dan pelancong lainnya, serta penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera. Lapangan usaha ini terdiri atas subsektor penyediaan akomodasi serta subsektor penyediaan makan minum.

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum digunakan sebagai salah satu indikator kinerja sektor pariwisata karena memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas perjalanan wisata dan memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2025, kontribusi lapangan usaha ini terhadap PDB nasional atas dasar harga berlaku mencapai 2,68 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2,64 persen. Kontribusi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan Lapangan Usaha Jasa Lainnya, yang antara lain mencakup kegiatan kesenian, hiburan, dan rekreasi, dengan kontribusi sebesar 2,14 persen pada tahun 2025.

Pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman merupakan persentase (%) peningkatan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun tertentu (t1) yang dibandingkan dengan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun sebelumnya (t-1). Persentase peningkatan nilai tambah sektor akomodasi makanan dan minuman diperoleh dengan mencari selisih antara PDB akomodasi makanan minuman pada tahun t1 dengan PDB akomodasi makanan minuman pada tahun t-1. Adapun formulasi penghitungan pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PDBakmmt1} = [(PDBakmmt1 - PDBakmmt - 1) / PDBakmmt - 1] \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 10,01% yang ditetapkan dalam dokumen RKP 2026 dan RPJMN 2025-2029. Tidak terdapat target triwulanan pada dokumen perencanaan nasional, sehingga target triwulanan adalah hasil proyeksi internal Deputy V, untuk triwulan II 2026 indikator pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman ditargetkan sebesar 8,5%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, belum tersedia rilis resmi dari BPS terkait Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman sehingga dilakukan proyeksi internal terhadap capaian sektor ini. Adapun proyeksi pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman di triwulan II adalah 9% atau mencapai 105,88% dibandingkan target triwulan II dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1. Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	10,01%	8,5%*	9%*	105,88 %

*) angka proyeksi internal

Capaian kinerja indikator Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum pada Triwulan II Tahun 2026 diproyeksikan sebesar 9,00 persen, atau mencapai 105,88 persen dari target triwulanan sebesar 8,50 persen. Kinerja tersebut menunjukkan aktivitas sektor akomodasi dan makan minum tetap tumbuh positif, yang didukung oleh peningkatan mobilitas dan perjalanan wisatawan nusantara selama periode libur nasional dan libur sekolah, penyelenggaraan berbagai event di sejumlah destinasi, serta meningkatnya permintaan terhadap layanan hotel, restoran, dan jasa makanan minuman. Meskipun demikian, angka tersebut masih merupakan proyeksi internal dan akan dimutakhirkan setelah data resmi PDB Triwulan II Tahun 2026 dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Eskalasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat eselon I untuk	Terlaksana	Telah dilakukan audiensi ke Gubernur Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk akselerasi pembahasan MoU

	penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman		Pemanfaatan 4 Candi pada 28 dan 29 April 2026
2	Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman	Terlaksana	Mengikuti Rakor Persiapan Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II pada 18 Mei dan 5 Juni 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan menerima audiensi dari Indonesia Health Tourism Board pada 18 Mei 2026, serta mengikuti pembahasan teknis terkait RIDPN yang diselenggarakan oleh Kemenpar.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen dan percepatan pembahasan pemanfaatan empat kawasan candi sebagai bagian dari pengembangan daya tarik wisata dan peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya;
2. Masukan kebijakan untuk pengembangan produk wisata, peningkatan kualitas destinasi, perluasan pasar, dan penguatan integrasi program lintas sektor, yang diharapkan dapat mendorong kunjungan wisatawan serta meningkatkan permintaan terhadap layanan akomodasi dan makan minum.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan II tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu berkurangnya dorongan musiman konsumsi setelah periode Hari Raya Idul Fitri yang sebagian besar telah terkonsentrasi pada Triwulan I. Kondisi tersebut menyebabkan sektor

pariwisata perlu mencari sumber pertumbuhan tambahan agar permintaan terhadap jasa akomodasi, makanan, dan minuman tetap terjaga. Selain itu, pelaksanaan kebijakan pendukung pariwisata masih memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, khususnya terkait sinkronisasi program event, pemberian insentif perjalanan, serta konektivitas transportasi. Ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global juga dapat memengaruhi daya beli, keputusan perjalanan, biaya transportasi, serta kunjungan wisatawan mancanegara.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, berikut adalah beberapa rekomendasi dan upaya perbaikan yang mungkin dilakukan:

1. diperlukan percepatan pelaksanaan kebijakan pendorong konsumsi dan mobilitas masyarakat, antara lain melalui pemberian insentif atau diskon transportasi pada periode libur sekolah, optimalisasi momentum hari libur dan cuti bersama, penerapan skema work from anywhere, serta penguatan program pariwisata dan penyelenggaraan event di berbagai destinasi.
2. perlu dilakukan peningkatan konektivitas dan kualitas layanan destinasi, serta penguatan promosi dan pengembangan produk wisata bernilai tambah. Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung oleh koordinasi dan pemantauan lintas sektor secara berkala agar stimulus yang diberikan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan, lama tinggal, belanja wisatawan, serta permintaan terhadap jasa akomodasi dan makan minum.

4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)

Latar Belakang

Indikator ini menunjukkan jumlah uang yang dibelanjakan oleh wisatawan mancanegara selama kunjungan mereka di suatu negara. Pengeluaran ini mencakup berbagai aspek, seperti: Akomodasi, Makanan dan Minuman, Transportasi, Belanja, Tiket Masuk Objek Wisata, Layanan Pribadi, dan Kegiatan Wisata. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara merupakan indikator utama dalam mengukur capaian devisa dari sektor pariwisata. Indikator ini mencerminkan besarnya nilai ekonomi yang dibelanjakan oleh wisatawan asing selama kunjungan mereka di Indonesia. Peningkatan devisa pariwisata secara langsung bergantung pada kemampuan Indonesia dalam menarik wisatawan berkualitas dengan tingkat belanja tinggi. Salah satu pendekatan strategis untuk mencapai hal ini adalah melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas destinasi pariwisata. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dimaksud mencakup perluasan dan penguatan aksesibilitas wilayah destinasi pariwisata, baik melalui jalur udara, laut, maupun darat, serta peningkatan integrasi transportasi antar destinasi prioritas. Melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas pariwisata ini, diharapkan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi lebih mudah dan nyaman, memperluas jangkauan destinasi yang dikunjungi, memperpanjang lama tinggal, serta mendorong peningkatan aktivitas wisata yang berdampak langsung terhadap pengeluaran wisatawan mancanegara sehingga dapat secara signifikan berkontribusi terhadap capaian devisa dan peningkatan daya saing sektor pariwisata.

Dalam pencapaian IKU ini, peran Deputy V sebagai policy orchestrator yang menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Peran ini mencakup penyalarsan kebijakan sektor pariwisata dengan sektor pendukung utama, seperti transportasi, perhotelan, perdagangan, dan UMKM, guna memastikan bahwa pengeluaran wisatawan mancanegara memberikan dampak ekonomi yang optimal dan terdistribusi secara luas. Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Deputy V memastikan konsistensi arah kebijakan, efektivitas instrumen insentif, serta keterukuran dampak kebijakan terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi nasional. Sementara itu, Kementerian Pariwisata berperan sebagai policy implementer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kebijakan dan regulasi yang berkaitan langsung dengan indikator pengeluaran wisatawan mancanegara. Implementasi tersebut dilakukan melalui penguatan promosi destinasi pariwisata unggulan, penyelenggaraan event internasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas kunjungan, serta pengembangan produk pariwisata berbasis pengalaman, termasuk atraksi wisata, kuliner lokal, dan ekonomi kreatif. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya tarik destinasi dan memperpanjang lama tinggal, sehingga dapat mendorong peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara secara berkelanjutan.

Data Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan) diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui hasil Passenger Exit Survey. Survei tersebut menghimpun informasi mengenai karakteristik wisatawan mancanegara, pola perjalanan, lama tinggal, serta pola pengeluaran selama berada di Indonesia. Data hasil survei selanjutnya dipublikasikan oleh BPS melalui publikasi Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dan tabel statistik terkait. Dengan demikian, dalam pemantauan capaian indikator, unit kerja tidak melakukan penghitungan secara mandiri, melainkan menggunakan data resmi yang dirilis oleh BPS.

Indikator Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dinyatakan dalam satuan dolar Amerika Serikat per kunjungan dan menggambarkan rata-rata pengeluaran setiap wisatawan mancanegara dalam satu kali kunjungan ke Indonesia. Data yang digunakan merupakan angka resmi BPS pada periode pelaporan yang tersedia.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 1.400 - 1.479 USD/Kunjungan yang ditetapkan dalam dokumen RKP 2026 dan RPJMN 2025-2029. Tidak terdapat target triwulanan pada dokumen perencanaan nasional, sehingga target triwulanan adalah hasil proyeksi internal Deputy V, untuk triwulan II 2026 indikator pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan ditargetkan sebesar 1.360 USD/kunjungan.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Pengeluaran Wisatawan Mancanegara mencapai 1365,61 USD/kunjungan atau tercapai 100,41% dari target triwulan I tahun 2026 ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	-------------------	--------------------	-----------	-----------

IKU 4.2. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Persentase	1.400 - 1.478	1.360*	1.365,61*	100,4 1%
--	------------	------------------	--------	-----------	-------------

*) Angka Proyeksi Internal

Hingga Triwulan II Tahun 2026, indikator Pengeluaran Wisatawan Mancanegara diproyeksikan mencapai USD1.365,61 per kunjungan, atau sebesar 100,41 persen dari target Triwulan II yang ditetapkan sebesar USD1.360 per kunjungan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara tetap terjaga dan telah melampaui target triwulanan, meskipun masih berada di bawah batas bawah target tahunan 2026 sebesar USD1.400 per kunjungan. Kinerja ini antara lain didukung oleh meningkatnya aktivitas perjalanan wisatawan mancanegara, penyelenggaraan berbagai event dan kegiatan pariwisata, serta konsumsi wisatawan terhadap layanan akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, belanja, dan aktivitas rekreasi. Angka tersebut masih merupakan proyeksi internal dan akan dimutakhirkan setelah data resmi Triwulan II Tahun 2026 tersedia.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Eskalasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat eselon I untuk penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Rakor Tingkat eselon I terkait Kebijakan Bebas Visa Kunjungan pada 15 April 2026 2. Telah dilaksanakan Rakor Pemetaan Stimulus dalam rangka Mendorong Kontribusi Sektor Pariwisata bagi Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2026 pada 9 Juni 2026
2	Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait	Terlaksana	Telah dilaksanakan FGD Penguatan Tata Kelola Risiko melalui Pengembangan Ekosistem Asuransi Pariwisata untuk Membangun Pariwisata

	pengeluaran wisatawan mancanegara		Berkualitas dan Berkelanjutan di Labuan Bajo pada 21 April 2026
--	-----------------------------------	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti Rakor Pelaksanaan Kebijakan Harga Avtur bagi Industri Penerbangan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi ESDM pada 7 Mei 2026;
2. Mengikuti Rakor
3. Mengikuti Rakor Nasional Pariwisata Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemenpar pada 20 Mei 2026;
4. Mengikuti Tourism Investment Dialogue - Investment to Boost Tourism Attraction pada 2 Juni 2026;
5. Mengikuti dan mendukung kegiatan Bali Wellness dan Beauty Expo 2026 pada 4 Juni 2026.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Dalam pembahasan perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan, telah dicapai kesepakatan lintas kementerian/lembaga mengenai usulan penambahan subjek BVK kepada delapan negara, yaitu Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Macao SAR, Belarusia, dan Kazakhstan, serta perluasan fasilitas bagi pemegang permanent resident Singapura;
2. Dalam hal pengembangan ekosistem asuransi pariwisata menghasilkan pemetaan awal atas kesenjangan regulasi, standardisasi, sertifikasi, pengawasan, serta rendahnya penetrasi asuransi pada pelaku usaha dan wisatawan di Labuan Bajo. Hasil kegiatan tersebut menjadi dasar penyusunan desain percontohan yang mengintegrasikan standar keselamatan, pengawasan, asuransi, dan kebutuhan investasi, termasuk usulan penerapan skema asuransi pada sekitar seratus kapal wisata sebagai langkah awal untuk membangun destinasi yang lebih aman, tangguh, dan berkualitas.
3. Selain itu, koordinasi mengenai harga tiket penerbangan, Rencana Induk Pariwisata Nasional, dialog investasi atraksi wisata, serta dukungan terhadap penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif menghasilkan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas produk, lama tinggal, dan aktivitas belanja wisatawan mancanegara selama berkunjung ke Indonesia.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan II tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala utama yang dihadapi adalah koordinasi lintas sektor. Pada pembahasan perluasan Bebas Visa Kunjungan, perbedaan kepentingan antar instansi, khususnya terkait penerimaan negara, aspek keamanan, pengawasan keimigrasian, dan tujuan peningkatan kunjungan wisatawan, menyebabkan proses penyelarasan serta penetapan kebijakan belum dapat berlangsung secara cepat. Sementara itu, pengembangan ekosistem asuransi pariwisata masih terkendala oleh fragmentasi kewenangan, belum terintegrasinya perizinan, sertifikasi, standar keselamatan, pengawasan, dan persyaratan asuransi, serta rendahnya literasi dan kepesertaan asuransi di kalangan wisatawan dan pelaku usaha. Keterbatasan data mengenai profil risiko, kecelakaan, klaim, dan jumlah pelaku usaha juga menyulitkan penyusunan produk asuransi yang sesuai dan terjangkau.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa rekomendasi perbaikan untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara, antara lain:

1. Diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga melalui penetapan pembagian peran, target waktu, dan pemantauan tindak lanjut yang jelas untuk mempercepat penyelesaian kajian serta regulasi pelaksana kebijakan BVK, dengan tetap memperkuat mekanisme prapenyaringan dan pengawasan berbasis data. Kebijakan BVK juga perlu diintegrasikan dengan peningkatan konektivitas penerbangan, promosi pada pasar potensial, serta pengembangan paket wisata yang dapat memperpanjang lama tinggal dan meningkatkan belanja wisatawan.
2. Dalam pengembangan asuransi pariwisata, perlu dibangun model tata kelola terpadu yang menghubungkan standar keselamatan, sertifikasi, perizinan, pengawasan, dan kepesertaan asuransi, disertai penguatan basis data risiko serta pelaksanaan proyek percontohan di Labuan Bajo. Upaya tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha, edukasi mengenai manfaat asuransi, dan pengembangan produk yang sesuai dengan karakteristik serta kemampuan usaha pariwisata

4.3 Persentase Penyelesaian Tata Kelola Program IQTF

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; dan (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Pariwisata; (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Isu strategis terkait bidang pembiayaan pengembangan pariwisata mencakup penyusunan draf regulasi tentang Dana Pariwisata Berkualitas (DPB).

Persentase keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan bidang pembiayaan pengembangan pariwisata dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :

Tahap 4, rentang persentase 72,5 – 100%
Tahap 3, rentang persentase 46 – 72,5%
Tahap 2, rentang persentase 21 – 45%
Tahap 1, rentang persentase 0 – 20%

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Penyelesaian Tata Kelola Program IQTF diukur dari realisasi pelaksanaan sudah sampai tahap yang mana. Adapun rincian Realisasi Persentase Penyelesaian Tata Kelola Program IQTF hingga triwulan II 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.2. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Persentase	80	45	45	100

Realisasi triwulan II 2026 menunjukkan bahwa saat ini keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang pembiayaan pengembangan pariwisata masuk dalam Tahap 2, yaitu Penyusunan Alternatif Rekomendasi, atau penyelesaian sebesar 45%, melalui koordinasi pembentukan Tim Penyusunan Tata Kelola Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF).

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Penetapan RPerpres tentang Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF)	Tertunda dan digeser	Penetapan Perpres IQTF masih menunggu paraf Menpar dan Menkeu
2	Pengumpulan dan konsolidasi masukan substansi dari K/L terkait RPermenko Perekonomian mengenai peraturan turunan Perpres Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF)	Tertunda dan digeser	Akan dilaksanakan di TW 3 dan TW 4
3	Penyusunan RKepmenko mengenai Sekretariat IQTF	Tertunda dan digeser	Diharapkan setelah penetapan Perpres IQTF dapat dilakukan penetapan RPermenko

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan membentuk Tim Penyusun Tata Kelola Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF) melalui surat Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Nomor

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian berupa usulan nama anggota tim penyusunan tata kelola Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF)

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan II tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu belum terselesaikannya paraf persetujuan dari Menteri Pariwisata dan Menteri Keuangan terhadap draf RPerpres IQTF.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun rekomendasi perbaikan melalui koordinasi dengan Kemenpar dan Kemenkeu mengenai hambatan pemberian paraf persetujuan dari Menpar dan Menkeu.

Pencapaian Sasaran Program 5: **Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Indeks

Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Latar Belakang

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) proses tahapan, yakni (i) Identifikasi Permasalahan, (ii) Penyusunan Alternatif Rekomendasi, (iii) Formulasi Kebijakan, serta (iv) Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi di antaranya **rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**. Isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata adalah:

1. Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka
2. Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil
3. Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
4. Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis
5. Pengembangan Pariwisata.

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator *internal business* yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*).

2. Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

3. Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk

menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

4. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau *piloting*, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks efektivitas SKP} = \sqrt[5]{SKP_{AD 1} \times SKP_{AD 2} \times SKP_{AD 3} \times SKP_{AD 4} \times SKP_{AD 5}}$$

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100

Efektif (3), rentang nilai 81 - 90

Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80

Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada tren-tren pada tahun sebelumnya. Adapun target Triwulan I ditetapkan dengan nilai yang sama.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang telah terealisasi sebesar 106,32 yang dikonversi ke skala indeks menjadi 4 (sangat efektif) atau mencapai 133% dari target Triwulan I sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi	% Kinerja
IKU 5.1 Indeks Efektivitas	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	4 dari 4	133,33%

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata					
--	--	--	--	--	--

Perhitungan realisasi tersebut didasarkan atas pencapaian efektivitas pelaksanaan KSP di masing-masing Asisten Deputi dibawah lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Adapun isu strategis terkait pengembangan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil menjadi isu yang dikoordinasikan paling efektif dibandingkan dengan isu lainnya dengan nilai 120,74. Ringkasan realisasi nilai efektivitas KSP untuk masing-masing Asisten Deputi dan perhitungan nilai Indeks Efektivitas KSP Kedeputian adalah sebagai berikut:

No.	Isu Strategis	Realisasi TW II
1.	Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka	100,00
2.	Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil	120,74
3.	Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	112,50
4.	Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	100,00
5.	Pengembangan Pariwisata	100,00

$$\text{Indeks KSP Deputi IKP} = \sqrt[5]{120,74 \times 100 \times 112,50 \times 100 \times 100} = 106,32$$

Hasil akhir nilai Indeks KSP Deputi adalah 106,32 yang berada pada rentang sangat efektif (nilai Indeks 4).

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan

	TW II		
1.	Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Terlaksana	● Penguatan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan sektor industri terus dilaksanakan melalui pembahasan berbagai isu strategis terkait hilirisasi industri agro, pengembangan bahan baku berbasis sumber daya alam, penguatan ekosistem industri kimia, farmasi, alat kesehatan, tekstil, dan alas kaki. Kegiatan meliputi rapat koordinasi, harmonisasi regulasi, audiensi dengan pelaku usaha dan asosiasi, monitoring lapangan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, mendukung keberlanjutan industri, serta mengoptimalkan implementasi berbagai kebijakan strategis, termasuk pemanfaatan peluang I-EU CEPA. ● Koordinasi pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka (ILMATEA) difokuskan pada penyelesaian berbagai kendala investasi, peningkatan utilisasi industri, penguatan implementasi TKDN dan P3DN, pengembangan industri baja, perkeretaapian, kendaraan listrik, serta industri elektronik. Berbagai FGD, sharing session, dan rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan investasi, memperkuat rantai pasok domestik, serta mempercepat transformasi industri menuju sektor bernilai tambah tinggi. ● Pelaksanaan koordinasi di bidang ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penguatan program

			pelatihan vokasi, link and match antara dunia pendidikan dan industri, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), monitoring implementasi kebijakan upah minimum, serta penguatan perlindungan pekerja melalui penerbitan berbagai regulasi, termasuk perlindungan pekerja rumah tangga, pekerja transportasi online, pekerja sektor perikanan, dan pekerja alih daya. • Koordinasi percepatan pengembangan kawasan ekonomi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) dilaksanakan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan debottlenecking terhadap pengembangan kawasan strategis, pembiayaan alternatif infrastruktur, penanganan dampak sosial, percepatan investasi, serta evaluasi usulan dan pelaksanaan PSN di berbagai sektor. Kegiatan tersebut menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan untuk mempercepat penyelesaian hambatan, mendukung investasi, memperkuat tata kelola kawasan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek strategis nasional. • Di bidang pariwisata, koordinasi difokuskan pada penguatan tata kelola destinasi pariwisata melalui percepatan penyelesaian isu strategis lintas kementerian/lembaga, pembaruan kerjasama pengelolaan destinasi, penyelenggaraan forum koordinasi nasional, penyusunan kajian
--	--	--	---

			pengembangan ekosistem asuransi pariwisata, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut mendukung peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan, aman, dan berdaya saing.
2.	Pelaksanaan Survei Efektivitas Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Tidak Terlaksana	Survei belum dilaksanakan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait guna mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang dihadapi dan mendiskusikan solusi terhadap masalah tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya melakukan optimalisasi pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dengan menggunakan media daring sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 10.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan dukungan layanan pimpinan yang akan dilakukan pada periode Triwulan II.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Ketidakpastian kondisi global, termasuk geopolitik dan perang dagang, berdampak pada rantai pasok, kenaikan harga bahan baku, penurunan produksi, dan belum optimalnya utilisasi industri nasional.
2. Efisiensi anggaran, pemblokiran anggaran, serta penyesuaian struktur organisasi dan reorganisasi kementerian/lembaga menyebabkan sebagian kegiatan koordinasi dan penyusunan kebijakan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Koordinasi lintas sektor masih menghadapi kendala berupa kompleksitas pembagian kewenangan, harmonisasi regulasi yang memerlukan waktu, serta keterbatasan integrasi dan validitas data antarinstansi.
4. Implementasi kebijakan sektoral masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain relaksasi TKDN, rendahnya utilisasi industri baja, lemahnya implementasi P3DN, keterbatasan sarana pelatihan vokasi, belum optimalnya Sistem Informasi Pasar Kerja, serta belum tersusunnya seluruh aturan pelaksana di bidang ketenagakerjaan.

5. Di bidang pariwisata, proses penyelesaian kerjasama pemanfaatan kawasan cagar budaya mengalami hambatan akibat perubahan pihak yang terlibat dalam nota kesepahaman (MoU), sehingga memerlukan penyesuaian koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi lintas kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan untuk mempercepat harmonisasi kebijakan, penyelesaian isu strategis, dan implementasi program prioritas.
2. Meningkatkan kualitas penyediaan, validasi, dan integrasi data melalui penguatan koordinasi teknis, kolaborasi antar instansi, serta optimalisasi mekanisme pertukaran data.
3. Memperkuat daya saing industri melalui penyempurnaan implementasi TKDN dan P3DN, evaluasi kebijakan masterlist, penguatan rantai pasok domestik, peningkatan kepastian regulasi, serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri.
4. Mendorong percepatan pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja, peningkatan kapasitas pelatihan vokasi melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta memperkuat koordinasi implementasi regulasi ketenagakerjaan di pusat dan daerah.
5. Mempercepat penyelesaian kerjasama lintas instansi di sektor pariwisata melalui koordinasi dengan Danantara, percepatan penandatanganan PKS/MoU, serta penguatan koordinasi dalam tata kelola destinasi pariwisata.

6

**Sasaran Program 6:
Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 6: **Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Indeks Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata diperoleh dari rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan empat kategori penilaian, yaitu:

**jaan dan
Pariwisata**

1. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
2. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
3. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
4. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Formula perhitungan indeks tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{(\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5})}{5}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja berupa nilai Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 dengan nilai 3 dari 4 yang berarti memuaskan.

Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu: (i) Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*); (ii) Aspek Keandalan dalam layanan (*Reliability*); (iii) Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*); (iv) Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*); dan (v) Aspek Sikap dalam Layanan (*Empathy*). Seluruh aspek kepuasan tersebut dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu : (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

Pada Triwulan II Tahun 2026, nilai indeks kepuasan layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang diisi responden adalah 3,53 dari 4 atau mencapai 117% dari target Triwulan II Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi	% Kinerja
IKU 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	3 dari 4	3 dari 4	3,53	117%

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Pelayanan Kegiatan Deputy	Terlaksana	1. Rapat Internal/Brief Mingguan rutin dengan Plt. Deputy;
2.	Koordinasi Kegiatan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Semester I	Terlaksana	1. Rapat Internal/Brief Mingguan rutin dengan Plt. Deputy; 2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Aduan pada Kanal Debottlenecking Satgas P2SP tanggal 08 April 2026; 3. Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 terkait Perluasan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) tanggal 15 April 2026; 4. Rapat Koordinasi Potensi Pengembangan Industri di Kota Cilegon tanggal 23 April 2026; 5. Rapat Koordinasi Pemaparan dan Pembahasan Usulan Penetapan Program Penataan BUMN dan Anak Usaha BUMN menjadi PSN tanggal 04 Mei 2026; 6. Rapat Koordinasi Pembahasan Upaya Mitigasi dalam Menjaga Pertumbuhan Industri Nasional tanggal 07 Mei 2026; 7. Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Pengembangan Komoditas tanggal 07 Mei 2026; 8. Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Pengaturan Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tanggal 11 Mei 2026;

			9. Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata Tahun 2026 tanggal 20 Mei 2026; 10. Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1: Pemetaan Kebijakan Stimulus dalam rangka mendorong kontribusi sektor pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi semester II tahun 2026 tanggal 09 Juni 2026; 11. Rapat Koordinasi Eselon 1 terkait: 1). Progres PSN Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi; 2). Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Komoditas Bauksit PT Tianshan Alumina Indonesia; 3). Kawasan Industri i-Sentra@Lamongan; 4). Pembangunan Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) tanggal 18 Juni 2026; 12. Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Tukar Menukar Lahan dalam rangka Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit PT Tianshan Alumina Indonesia sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tanggal 23 Juni 2026;
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan *benchmarking* secara informal dengan unit kedeputian lain mengenai Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian pada masing-masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya memanfaatkan aplikasi *video conference* seperti zoom meeting sehingga dapat menghemat anggaran konsumsi rapat sebesar Rp 2.025.000 (untuk 1x rapat dengan asumsi peserta sebanyak 25 orang) untuk 1x pelaksanaan rapat daring. Selain itu, survei dibuat dalam bentuk *google form* sebagai efisiensi, sehingga tidak diperlukan pencetakan bahan dan anggaran untuk melakukan pencetakan bahan dapat dialihkan sebagian ke akun lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tetap disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai: Memastikan pelaksanaan survei layanan dapat terlaksana sesuai jadwal yang sudah direncanakan.

7	Sasaran Program 7: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas
---	---

Pencapaian Sasaran Program 7: **Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas** ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Latar Belakang

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 adalah sebesar 92%. Adapun target Triwulan II sebesar 46%.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang telah terealisasi sebesar 46 % atau mencapai 100% dari target Triwulan II dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	-------------------	--------------------	-----------	-----------

IKU 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase	92%	46%	46 %	100 %
---	------------	-----	-----	------	-------

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Mendukung Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB General dan Tematik	Terlaksana	Telah ditindak lanjuti Nota Dinas Nomor: RB.01/133/SET.M.EKON.2/06 /2026 perihal Penyampaian Panduan Pengisian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan RB Tematik
2.	Melakukan monitoring dan Evaluasi Implementasi Renaksi TW I agen perubahan tahun	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Akselerasi Peningkatan Nilai SAKIP melalui Penguatan Akuntabilitas Laporan Kinerja dan Pemanfaatannya dalam Mendorong Nilai Tambah Sektor Pariwisata Tahun 2026 pada 29 April 2026 berdasarkan UND Nomor: PW.04.01/209/D.V.M.EKON.1/04/2026 Penyampaian Nota Dinas Nomor: AK.02.02/265/D.V.EKON.1/05/2026 perihal Laporan Hasil

			Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Deputi V
3.	Penyusunan Laporan Kinerja dan pelaksanaan Anggaran Triwulan I	Terlaksana	Nota Dinas Nomor: AK.03/226/D.V.M.EKON.1/04/2026 Perihal Permintaan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2026
4.	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Terlaksana	Pada Triwulan I tahun 2026, Pemanfaatan Aplikasi Srikandi di lingkungan Deputi V telah dioptimalkan untuk Mempercepat Proses Korespondensi antar Instansi serta Memperkuat Tata Kelola Digitalisasi Arsip yang Lebih Sistematis dan Akuntabel. Telah ditindak lanjuti Nota Dinas Nomor: TU.04/85/SES.M.EKON/05/2026 perihal Hasil Evaluasi Keaktifan User Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5.	Melakukan revisi TOR/RAB	Terlaksana	Telah dilakukan revisi RAB di Kedeputan V yaitu melalui ND Nomor: 1. PR.04.01/247/D.V.M.EKON.1/04/2026 tanggal 27 April 2026 2. PR.04.01/278/D.V.M.EKON.1/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 3. PR.04.01/304/D.V.M.EKON.1/06/2026 tanggal 24 Juni 2026
6.	Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP	Terlaksana	Telah ditindak lanjuti ND Penyampaian Kertas Kerja Penilaian Mandiri (PM) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Deputi V Tahun 2026 Telah disampaikan ND Penyampaian Counterpart SPIP D5

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan *benchmarking* dengan unit kedeputan lain mengenai layanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program

kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi pada masing-masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI untuk mengelola persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tetap disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Jakarta, Juli 2026
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Industri, Ketenagakerjaan, dan
Pariwisata

Dida Gardera

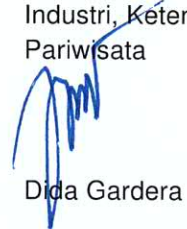
kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi pada masing-masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI untuk mengelola persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tetap disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Jakarta, 10 Juli 2026
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Industri, Ketenagakerjaan, dan
Pariwisata



Dida Gardera